

# **PERSEPSI AKADEMISI DAN PRAKTISI TERHADAP PENERAPAN NILAI WAJAR DI INDONESIA**



## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**TIAS NUGRAHA PUTRA**

**NIM. 12030110141025**

**PROGRAM EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Tias Nugraha Putra

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141025

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PERSEPSI AKADEMISI DAN PRAKTISI  
TERHADAP PENERAPAN NILAI WAJAR DI  
INDONESIA**

Dosen Pembimbing : Puji Harto, S.E., M. Si., Akt., Ph.D

Semarang, 12 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

(Puji Harto, S.E., M. Si., Akt., Ph.D)

NIP. 197505272000121001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Tias Nugraha Putra

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141025

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PERSEPSI AKADEMISI DAN PRAKTISI  
TERHADAP PENERAPAN NILAI WAJAR DI  
INDONESIA**

**Telah dinyatakan lulus pada tanggal 27 Maret 2015**

Tim Penguji

1. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
2. Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo, M.Si., Akt. (.....)
3. Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Tias Nugraha Putra, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Persepsi Akademisi dan Praktisi Terhadap Penerapan Nilai Wajar di Indonesia** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjuk gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 12 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

Tias Nugraha Putra

NIM: 12030110141025

## **ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the perception of academic and practitioner on the implementing of fair value in Indonesia. The implementing of fair value in Indonesia is still a new thing, because many companies are still using the historical cost. Changes in the measurement from historical cost to fair value may affect the results of the financial statements, so this caused debate among various parties, both from academics and practitioners.*

*This study used primary data which derived from academics, the university accounting lecturers and practitioners whom are auditors who work in public accounting firms in Semarang. Each sample consist of 46 accounting lecturers and 44 accounting practitioners, so total of the respondents are 90 respondents. Respondents were given a questionnaire and asked to respond the statements using a Likert scale. Data were analyzed using one-sample t test, independent sample t test, if it doesn't normally distributed then use the Mann-Whitney U test.*

*This study showed that academics and practitioners optimistic the implementing of fair value can obtain greater benefits than disadvantages about fair value accounting in Indonesia. Perceptions of academics and practitioners have great challenges that will be faced in the implementing of fair value in Indonesia. The next results of the study showed that there are differences in the perception of the benefits and disadvantages in the implementing of fair value where academic have a higher confidence level than the practitioner, while both of them have the same perception to the challenges in facing the implementing of fair value in Indonesia.*

*Keywords: Perception, fair value accounting, implementing, IFRS 13.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi akademisi dan praktisi terhadap penerapan nilai wajar di Indonesia. Penerapan nilai wajar di Indonesia masih hal baru, karena sebelumnya perusahaan masih menggunakan biaya historis. Perubahan pengukuran biaya historis ke nilai wajar dapat mempengaruhi hasil laporan keuangan, sehingga menimbulkan perdebatan dari berbagai kalangan, baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan praktisi.

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari kalangan akademisi, yaitu dosen akuntansi perguruan tinggi dan kalangan praktisi, yaitu auditor yang berkerja di kantor akuntan publik di kota Semarang. Masing-masing sampel penelitian berjumlah 46 dosen akuntansi perguruan tinggi dan praktisi berjumlah 44, sehingga total responden berjumlah 90 responden. Responden diberikan kuesioner dan diminta untuk merespon pernyataan dengan menggunakan skala likert. Data dianalisis dengan menggunakan *one sample t test*, *independent sample t test*, jika tidak berdistribusi normal menggunakan *Mann-Whitney U test*.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akademisi dan praktisi optimis dengan penerapan nilai wajar dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dibanding kerugian mengenai penerapan nilai wajar di Indonesia. Persepsi akademisi dan praktisi memiliki tantangan besar yang akan dihadapi dalam penerapan nilai wajar di Indonesia. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap manfaat dan kerugian dalam penerapan nilai wajar dimana akademisi memiliki tingkat keyakinan yang lebih tinggi dibanding praktisi, sedangkan keduanya memiliki persepsi yang sama terhadap tantangan dalam menghadapi penerapan nilai wajar di Indonesia.

Kata kunci : Persepsi, nilai wajar, penerapan, *IFRS 13*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Persepsi Akademisi dan Praktisi Terhadap Penerapan Nilai Wajar di Indonesia**". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, doa dan saran dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Puji Harto, S.E., M. Si., Akt., Ph.D. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan motivasi, saran dan bimbingannya selama proses penyusunan hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si.,Akt. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasihat kepada penulis selama menempuh studi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah mempermudah dan memberikan fasilitas kegiatan perkuliahan penulis selama menempuh studi.
7. Ayah dan Ibu penulis, Drh. Asmadi dan Drh. Setyowati, yang selalu memberikan nasihat, bimbingan, arahan, doa dan segalanya kepada

penulis dan terima kasih juga kepada dua kakak penulis, yaitu: Tias Asmarani S.E., M.Si., Akt. dan Tias Dwi Pramita Sari S.E.

8. Tante Drg. Setyohastuti dan Om Roby, terima kasih telah memberikan motivasi dan nasihatnya kepada penulis selama ini.
9. Rizka Naili K, terima kasih atas perhatian dan motivasinya.
10. Sahabat-sahabat penulis, Reza Kurniawan, Atta Putra, Niko, Fani, Frisca, Irul, Bondan, Ardian, Nasrun, Armed, dan Hafid terima kasih atas bantuan kalian selama ini.
11. Seluruh teman-teman Akuntansi R2 khususnya kelas A, terima kasih banyak atas perjuangan bersama kalian dalam menempuh studi di Fakultas tercinta.
12. Temen-temen organisasi KSPM, Tim Kompetisi dan YOT Semarang, yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam mengikuti perlombaan.
13. Teman-teman KKN Undip Desa Plosowangi Nasrun, Rifna, Rincek, Fani, Mae, Vivi, Fanol, Sudin dan Tunjung.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa, semangat dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ada kekurangan karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai penerapan nilai wajar.

Semarang, 12 Maret 2015

Penulis

Tias Nugraha Putra



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	7
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1.1 Teori Regulasi .....	7
2.1.2 Persepsi .....	8
2.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68 Pengukuran Nilai Wajar .....	9
2.1.3.1 Ruang Lingkup PSAK 68 .....	10

2.1.3.2 Pengukuran .....	11
2.1.3.2.1 Definisi Nilai Wajar .....	11
2.1.3.2.2 Aset atau Liabilitas.....	12
2.1.3.2.3 Transaksi.....	12
2.1.3.2.4 Pelaku Pasar .....	13
2.1.3.2.5 Harga .....	13
2.1.3.2.6 Penerapan pada Aset Nonkeuangan .....	14
2.1.3.2.7 Penerapan pada Liabilitas dan Instrumen Ekuitas Milik Sendiri .....	15
2.1.3.2.8 Risiko Wanprestasi.....	16
2.1.3.2.9 Teknik Penilaian .....	16
2.1.3.2.9.1 Input Berdasarkan Harga <i>Bid and Ask</i> .....	17
2.1.3.2.9.2 Hirarki Nilai Wajar.....	18
2.1.3.3 Pengungkapan.....	18
2.1.4 Manfaat dan Kerugian dalam Penerapan Nilai Wajar .....	19
2.1.4.1 Manfaat .....	19
2.1.4.2 Kerugian .....	20
2.1.5 Tantangan dalam Penerapan Nilai Wajar.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu .....	22
2.3 Kerangka Pemikiran .....	24
2.4 Perumusan Hipotesis .....	25
2.4.1 Persepsi Akademisi Terhadap Penerapan Nilai Wajar .....	25
2.4.2 Perbedaan Persepsi Akademisi dan Auditor Terhadap Penerapan Nilai Wajar.....	25
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	28
3.1.1 Variabel Terikat (Dependent Variable) .....	28
3.1.1.1 Manfaat .....	28
3.1.1.2 Kerugian .....	29
3.1.1.3 Tantangan .....	30
3.2 Populasi dan Sampel .....	30
3.2.1 Populasi.....	30
3.2.2 Sampel.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	31
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.5 Metode Analisis .....	32
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	32
3.5.2 Uji Kualitas Data .....	33
3.5.2.1 Pengujian Validitas .....	33
3.5.2.2 Pengujian Reliabilitas.....	33
3.5.2.3 Pengujian Normalitas .....	34
3.5.3 Pengujian Hipotesis .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum Responden .....	35
4.1.1 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	40
4.1.2 Data Responden berdasarkan Usia .....	40
4.1.3 Data Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	40
4.1.4 Data Responden berdasarkan Keanggotaan atau Gelar Profesional .	40
4.1.4 Data Responden berdasarkan Jabatan Auditor .....	41
4.1.4 Data Responden berdasarkan Pengalaman Kerja .....	41

4.2 Analisis Data.....	41
4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	41
4.2.1.1 Hasil Uji Reliabilitas.....	42
4.2.2 Statistik Desriptif.....	43
4.2.2.1 Deskripsi terhadap Manfaat dalam Penerapan Nilai Wajar..	45
4.2.2.2 Deskripsi terhadap Kerugian dalam Penerapan Nilai Wajar.	46
4.2.2.3 Deskripsi terhadap Tantangan dalam Penerapan Nilai Wajar	47
4.2.3 Uji Normalitas .....	47
4.2.4 Pengujian Hipotesis .....	48
4.2.4.1 <i>One Sample t test dan Paired sample t test</i> .....	49
4.2.4.2 <i>One Sample t test</i> .....	51
4.2.4.3 <i>Independent sample t test</i> .....	53
4.3 Interpretasi Hasil .....	54
4.3.1 Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Penerapan Nilai Wajar .....	54
4.3.2 Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Tantangan dalam Penerapan Nilai Wajar .....	56
4.3.3 Perbedaan Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Penerapan Nilai Wajar .....	57
BAB V PENUTUP .....	60
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Keterbatasan.....	61
5.3 Saran.....	62
Daftar Pustaka .....	63

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1 Nilai Jawaban.....	32
Tabel 4.1 Perguruan Tinggi di Kota Semarang .....	35
Tabel 4.2 KAP di Kota Semarang .....	36
Tabel 4.3 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	37
Tabel 4.4 Profil Responden.....	38
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas .....	41
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas .....	43
Tabel 4.7 Deskripsi Indikator.....	44
Tabel 4.8 Deskripsi Indikator Keseluruhan.....	45
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas.....	48
Tabel 4.9 Hasil Uji <i>One Sample t test</i> terhadap manfaat .....	49
Tabel 4.10 Hasil Uji <i>paired sample t test</i> terhadap manfaat dan kerugian .....	50
Tabel 4.11 Hasil <i>One Sample t test</i> terhadap tantangan.....	51
Tabel 4.12 Hasil Uji <i>Independent sample t test</i> terhadap manfaat .....	52
Tabel 4.13 Hasil Uji <i>Independent sample t test</i> terhadap kerugian .....	53
Tabel 4.14 Hasil Uji <i>Mann Whitney U test</i> terhadap tantangan .....	54

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi .....	8
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	25

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran A Kuesioner Penelitian .....	65
Lampiran B Hasil Kuesioner .....	71
Lampiran C Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....	78
Lampiran D Hasil Statistik Deskriptif dan Uji Normalitas .....	84
Lampiran E Hasil Uji Hipotetis .....	87
Lampiran F Surat Keterangan Penelitian .....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi saat ini pengguna laporan keuangan tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga bisa berasal dari luar negeri, hal ini mendorong dewan standar akuntansi di berbagai negara untuk meningkatkan kualitas dan daya banding laporan keuangan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan daya banding tersebut adalah dengan mengadopsi standar akuntansi internasional, secara umum manfaat dari mengadopsi hal tersebut adalah pengguna laporan keuangan dapat memahami isi laporan keuangan dengan baik, meningkatkan arus investasi, membuka peluang *fund raising* melalui pasar modal, menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut Nunik (2010) dengan mengadopsi standar akuntansi internasional dapat memperoleh informasi yang berdaya banding secara global, tidak menimbulkan informasi yang asimetris (*asymetric information*) dan untuk mencegah *moral hazard*.

Untuk memperoleh manfaat dari mengadopsi standar akuntansi internasional, maka diperlukan suatu standar akuntansi yang dapat diterima secara umum (internasional), yaitu *International Financial Reporting Standards (IFRS)* yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)*. *IFRS* telah digunakan lebih dari 150 negara, termasuk negara-negara Uni Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin dan Australia. Sedikitnya, dari 85 negara-negara tersebut



telah mewajibkan laporan keuangan mereka menggunakan *IFRS* untuk semua perusahaan domestik atau perusahaan yang telah tercatat (*listed*) di pasar modal, sehingga *IFRS* telah menjadi standar akuntansi internasional yang dapat diterima secara umum (Hidayah, 2013).

Dengan adanya kesepakatan G-20, yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Maka negara-negara anggota G-20 berkomitmen untuk melakukan pengadopsian ke *IFRS* berbasis nilai wajar. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen dan secara bertahap melakukan pengadopsian *IFRS* yang telah dimulai dari tahun 2008 dan mulai berlaku pada tahun 2012.

Saat ini Indonesia telah mengadopsi beberapa standar *IFRS*, salah satu standar yang telah diadopsi adalah *IFRS 13 Fair Value Measurement*. *IFRS 13* telah diadopsi ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68 Pengukuran Nilai Wajar yang berlaku efektif 1 Januari 2015. Menurut Martani (2010) menyatakan bahwa penerapan standar *IFRS* berbasis nilai wajar ke dalam PSAK harus didukung oleh sumber daya manusia yang memahami standar baru tersebut, sehingga pendidikan dan pemutakhiran pengetahuan staf akuntansi sangat diperlukan dan penerapan standar baru juga mengharuskan perusahaan melakukan kajian ulang atas sistem operasi dan prosedur akuntansi perusahaan.

Penerapan nilai wajar akan menghabiskan banyak biaya dan dampak yang akan ditimbulkannya. Namun jika manfaat yang didapat lebih besar daripada biaya dan dampak yang ditimbulkan, maka nilai wajar dapat diterapkan. Nilai wajar dianggap lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan biaya historis

karena nilai wajar memberikan informasi keuangan sesuai keadaan pasar pada saat periode pelaporan. Nilai wajar juga memiliki kelemahan, seperti pengukuran pada hirarki nilai wajar yang dianggap kurang dapat diandalkan dan dapat dimanipulasi (Kluever, 2012).

Laux dan Leuz (2009) menyatakan bahwa dengan menggunakan nilai wajar akan menyebabkan volatilitas dalam laporan keuangan dan nilai wajar dapat menimbulkan penularan disaat krisis. Omoteso dan Aziz (2014) menyatakan bahwa nilai wajar bukan merupakan penyumbang krisis tetapi dapat mendeteksi krisis datang lebih cepat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Phan *et al.* (2013) yang meneliti tentang persepsi profesional akuntansi terhadap penerapan *IFRS* di negara Vietnam. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti secara empiris mengenai persepsi akademisi dan praktisi terhadap penerapan nilai wajar di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penggunaan nilai wajar di Indonesia masih hal baru, karena sebelumnya perusahaan-perusahaan masih menggunakan biaya historis (*historical cost*). Perubahan pengukuran biaya historis ke nilai wajar dapat mempengaruhi hasil laporan keuangan, sehingga menimbulkan perdebatan dari berbagai kalangan. Terdapat beberapa kelompok dan kalangan yang mendukung penerapan nilai wajar, namun terdapat juga kelompok yang meragukan penerapan ini (Maruli dan Mita, 2010).

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian:

1. Apa persepsi akademisi dan praktisi mengenai manfaat, kerugian dan tantangan terhadap penerapan nilai wajar di Indonesia?
2. Apakah ada perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi tentang manfaat, kerugian dan tantangan terhadap penerapan nilai wajar di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kritis terhadap penerapan standar-standar *IFRS* berbasis nilai wajar dan sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Standar Akuntansi Indonesia ataupun perusahaan dalam penerapan nilai wajar. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis persepsi akademisi dan praktisi mengenai manfaat, kerugian dan tantangan terhadap penerapan nilai wajar di Indonesia.
2. Apakah ada perbedaan persepsi antara akademisi dengan praktisi tentang manfaat, kerugian dan tantangan terhadap penerapan nilai wajar di Indonesia.
3. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada dewan standar akuntansi dan perusahaan mengenai manfaat, kerugian dan tantangan terhadap nilai wajar di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Dewan Standar Akuntansi Indonesia dan Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap penerapan nilai wajar di Indonesia.

2. Bagi penulis

Penelitian ini menambah wawasan, pengetahuan dan sikap kritis terhadap penerapan standar-standar akuntansi *IFRS* berbasis nilai wajar.

3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan nilai wajar (*fair value*) atau PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab Pertama, yaitu berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua adalah Telaah Pustaka, bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap penelitian, beberapa penelitian terdahulu yang telah ada, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis.

Bab Ketiga adalah Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang deskripsi operasional dalam penelitian dan variabel penelitian, populasi dan sample, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab Keempat adalah Pembahasan, bab ini berisikan tentang deskripsi responden serta analisis terhadap hasil dari penelitian ini.

Bab Kelima adalah Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Regulasi**

Menurut Hendiksen (2005, dalam Widiyastuti, 2014) menyatakan bahwa regulasi terjadi sebagai reaksi terhadap suatu krisis yang tidak dapat diidentifikasi. Sedangkan menurut Chariri dan Ghozali (2003) menjelaskan bahwa permintaan terhadap kebijakan atau standar didorong oleh krisis yang muncul.

Menurut Stiglar (1971) dan Posner (1974, dalam Chariri dan Ghozali, 2003), teori kepentingan publik merupakan tanggapan atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Oleh karena itu penerapan nilai wajar merupakan regulasi standar akuntansi yang dibentuk untuk menyelaraskan laporan keuangan di semua negara. Namun menurut teori kepentingan kelompok, regulasi disediakan sebagai tanggapan atas permintaan kelompok tertentu untuk memaksimalkan kemakmuran. Sehingga penerapan nilai wajar dianggap merupakan kepentingan negara-negara di Eropa untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka.

Kesimpulan dalam teori ini adalah regulasi tergantung bagaimana pandangan publik terhadap dampak dari penerapan regulasi tersebut di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis persepsi akademisi dan praktisi mengenai manfaat, kerugian dan tantangan terhadap penerapan nilai wajar di Indonesia.

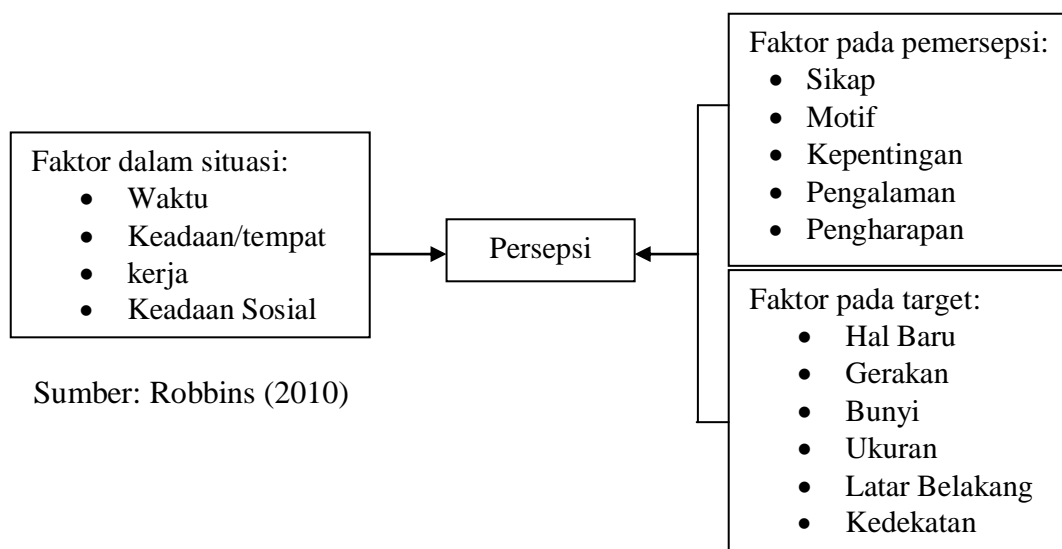
## 2.2 Persepsi

Menurut Besar Bahasa Indonesia (2003) mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Sedangkan Robbins (2010) menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses yang digunakan untuk mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka untuk memberi makna kepada lingkungan mereka.

Davidoff (1981, dalam Iprianto, 2009) menyatakan persepsi adalah hal yang rumit karena persepsi merupakan pertemuan antara proses kognitif dan kenyataan, persepsi lebih banyak melibatkan kegiatan kognitif. Persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, ingatan, pikiran, dan bahasa.

Iprianto (2009) menyimpulkan bahwa persepsi setiap individu/personal tentang obyek atau peristiwa sangat tergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam diri seseorang (aspek kognitif) dan faktor dari luar (stimulus visual).

**Gambar 2.1**  
**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi**



Melakukan penelitian tentang persepsi merupakan hal yang penting. Karena pada dasarnya persepsi adalah pembentuk *adjustment* seseorang terhadap peristiwa, orang lain dan hal-hal baru yang terjadi di lingkungannya.

Penerapan nilai wajar adalah hal yang baru bagi kalangan akademisi dan praktisi di Indonesia, namun beberapa dari mereka mungkin telah membaca jurnal atau makalah hasil dari penelitian orang lain. Hal ini dapat memberikan *adjustment* yang positif atau negatif tergantung dari apa yang mereka baca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi akademisi dan praktisi mengenai manfaat, kerugian dan tantangan terhadap penerapan nilai wajar di Indonesia.

### **2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68: Pengukuran Nilai Wajar**

Untuk meningkatkan konsistensi dan kejelasan terhadap definisi nilai wajar dan pengukurannya, maka *International Accounting Standards Board (IASB)* mengeluarkan *IFRS 13 Fair Value Measurement* dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2013. Indonesia telah mengadopsi standar tersebut ke dalam PSAK 68 yang akan berlaku 1 Januari 2015.

Tujuan dari standar ini adalah (PSAK 68:01):

- (a) mendefinisikan nilai wajar (*fair value*);
- (b) menetapkan dalam suatu Pernyataan, kerangka pengukuran nilai wajar;
- (c) mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar.

Nilai wajar adalah pengukuran yang berbasis harga pasar, bukan pengukuran spesifik atas suatu entitas. Untuk beberapa aset dan liabilitas,



transaksi berdasarkan harga pasar atau informasi pasar yang dapat diobservasi dapat tersedia. Untuk aset dan liabilitas lain, hal tersebut mungkin tidak tersedia. Akan tetapi, tujuan dari pengukuran nilai wajar adalah sama, yaitu untuk mengestimasi harga dimana suatu transaksi teratur (*orderly transaction*) untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluaran (*exit price*) pada tanggal pengukuran dari perspektif pelaku pasar yang memiliki aset atau liabilitas (PSAK 68:02).

Ketika harga untuk aset atau liabilitas tertentu (identik) tidak dapat diobservasi, maka menggunakan pengukuran nilai wajar dengan teknik penilaian lain yang memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi (*observable inputs*), relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi (*unobservable inputs*). Karena nilai wajar merupakan pengukuran berbasis harga pasar, sehingga nilai wajar diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas, termasuk asumsi mengenai risiko (PSAK 68:03). Definisi nilai wajar berfokus pada aset dan liabilitas karena keduanya merupakan subjek utama dalam pengukuran akuntansi (PSAK 68:04).

#### **2.1.1.1 Ruang Lingkup PSAK 68**

Persyaratan pengukuran dan pengungkapan dalam Pernyataan ini tidak berlaku untuk hal sebagai berikut (PSAK 68:06):

- (a) transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK 53:  
Pembayaran Berbasis Saham;

- (b) transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 30: Sewa; dan
- (c) pengukuran yang memiliki beberapa keserupaan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi neto (*net realisable value*) dalam PSAK 14: Persediaan atau nilai pakai (*value in use*) dalam PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.

Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan ini tidak disyaratkan untuk hal sebagai berikut (PSAK 68:07):

- (a) aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 24: Imbalan Kerja;
- (b) investasi program manfaat purnakarya yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 18: Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya;
- (c) aset yang jumlah terpulihkannya adalah nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.

Kerangka pengukuran nilai wajar yang dijelaskan dalam Pernyataan ini berlaku untuk pengukuran awal dan pengukuran selanjutnya, jika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan oleh Pernyataan lain (PSAK 68:08).

## **2.1.1.2 Pengukuran**

### **2.1.1.2.1 Definisi Nilai Wajar**

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran (PSAK 68:09).

#### 2.1.1.2.2 Aset atau liabilitas

Pengukuran nilai wajar adalah untuk aset atau liabilitas tertentu. Oleh karena itu, ketika mengukur nilai wajar harus memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut (PSAK 68:11):

- (a) kondisi dan lokasi aset; dan
- (b) pembatasan, jika ada, atas penjualan atau penggunaan aset.

Aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar dapat terdiri dari salah satu hal sebagai berikut (PSAK 68:13):

- (a) aset atau liabilitas yang berdiri sendiri (contohnya instrumen keuangan atau aset nonkeuangan); atau
- (b) sekelompok aset, sekelompok liabilitas atau sekelompok aset dan liabilitas (contohnya suatu unit penghasil kas atau bisnis)

#### 2.1.3.2.3 Transaksi

Pengukuran nilai wajar menggunakan asumsi bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini (PSAK 68:15). Transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas dalam pengukuran nilai wajar terjadi (PSAK 68:16):

- (a) di pasar utama (*principal market*) untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
- (b) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*) untuk aset atau liabilitas tersebut.

#### **2.1.3.2.4 Pelaku Pasar**

Entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya (PSAK 68:22). Dalam mengembangkan asumsi tersebut, entitas tidak perlu mengidentifikasi pelaku pasar yang spesifik. Sebaliknya, entitas mengidentifikasi karakteristik yang membedakan pelaku pasar secara umum, mempertimbangkan faktor yang spesifik untuk seluruh hal sebagai berikut (PSAK 68:23):

- (a) aset atau liabilitas;
- (b) pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) untuk aset atau liabilitas; dan
- (c) pelaku pasar yang akan melakukan transaksi dengan entitas di pasar tersebut.

#### **2.1.3.2.5 Harga**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluaran) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain (PSAK 68:24).

Harga di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) yang digunakan untuk mengukur nilai wajar aset atau liabilitas tidak disesuaikan

dengan biaya transaksi (*transaction costs*). Biaya transaksi dicatat sesuai dengan Pernyataan lain. Biaya transaksi bukan merupakan karakteristik suatu aset dan liabilitas; melainkan, merupakan sesuatu yang spesifik atas suatu transaksi dan akan berbeda tergantung pada bagaimana entitas melakukan transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut (PSAK 68:25).

Biaya transaksi tidak termasuk biaya transpor (*transport costs*). Jika lokasi merupakan karakteristik aset (sebagai contoh dalam kasus suatu komoditas), harga di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) disesuaikan dengan biaya tersebut, jika ada, yang akan dikeluarkan untuk mentranspor aset dari lokasinya saat ini ke pasar tersebut (PSAK 68:26).

#### **2.1.3.2.6 Penerapan pada Aset Nonkeuangan**

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (PSAK 68:27).

Penggunaan tertinggi dan terbaik aset nonkeuangan memperhitungkan penggunaan aset yang secara fisik dimungkinkan, secara hukum diizinkan dan layak secara keuangan, sebagai berikut (PSAK 68:28):

- (a) Penggunaan yang secara fisik dimungkinkan (*physically possible*) memperhitungkan karakteristik fisik aset yang akan diperhitungkan pelaku pasar ketika menentukan harga aset (contohnya lokasi atau ukuran properti).

- (b) Penggunaan yang secara hukum diizinkan (*legally permissible*) memperhitungkan adanya pembatasan hukum atas penggunaan aset yang akan diperhitungkan pelaku pasar ketika menentukan harga aset (contohnya peraturan kawasan yang berlaku atas properti).
- (c) Penggunaan yang layak secara keuangan (*financially feasible*) memperhitungkan apakah penggunaan aset yang secara fisik dimungkinkan dan secara hukum diizinkan menghasilkan pendapatan atau arus kas yang memadai untuk menghasilkan imbal hasil investasi yang dibutuhkan pelaku pasar dari investasi dalam aset tersebut, digunakan dalam penggunaan tersebut.

#### **2.1.3.2.7 Penerapan pada Liabilitas dan Instrumen Ekuitas Milik Entitas Sendiri**

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa liabilitas keuangan atau, liabilitas non keuangan atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri (contohnya kepemilikan saham yang diterbitkan sebagai pembayaran dalam suatu kombinasi bisnis) dialihkan kepada pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri mengasumsikan hal sebagai berikut (PSAK 68:34):

- (a) Liabilitas akan tetap terutang dan pelaku pasar yang menerima pengalihan (*transferee*) disyaratkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Liabilitas tidak akan diselesaikan dengan pihak lawan atau diakhiri pada tanggal pengukuran.

- (b) Instrumen ekuitas milik entitas sendiri akan tetap beredar dan pelaku pasar yang menerima pengalihan akan mengambil alih hak dan tanggung jawab yang terkait dengan instrumen tersebut. Instrumen tersebut tidak akan dibatalkan atau diakhiri pada tanggal pengukuran.

#### **2.1.3.2.8 Risiko Wanprestasi**

Nilai wajar liabilitas mencerminkan dampak risiko wanprestasi (*non-performance risk*). Risiko wanprestasi mencakup, namun tidak terbatas pada, risiko kredit entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan). Risiko wanprestasi diasumsikan sama sebelum dan sesudah pengalihan liabilitas (PSAK 68:42).

Ketika mengukur nilai wajar liabilitas, entitas memperhitungkan dampak dari risiko kreditnya (reputasi kredit) dan faktor lain apapun yang dapat mempengaruhi kemungkinan bahwa kewajiban akan atau tidak akan terpenuhi. Dampak tersebut dapat berbeda tergantung pada liabilitasnya, sebagai contoh (PSAK 68:43):

- (a) apakah liabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan kas (liabilitas keuangan) atau kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa (liabilitas non keuangan).
- (b) persyaratan peningkatan kualitas kredit terkait dengan liabilitas, jika ada.

#### **2.1.3.2.9 Teknik Penilaian**

Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan

penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi (PSAK 68:61).

Tujuan penggunaan teknik penilaian adalah untuk mengestimasi harga dimana suatu transaksi teratur untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Tiga teknik penilaian yang digunakan secara luas adalah pendekatan pasar, pendekatan biaya (*cost approach*) dan pendekatan penghasilan. Entitas menggunakan teknik penilaian secara konsisten dengan satu atau lebih dari pendekatan tersebut untuk mengukur nilai wajar (PSAK 68:62).

#### **2.1.3.2.9.1 Input Berdasarkan Harga *Bid and Ask***

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga *bid* dan harga *ask* (contohnya input dari pasar dealer), harga dalam *bid-ask spread* yang paling merepresentasikan nilai wajar dalam keadaan tersebut digunakan untuk mengukur nilai wajar terlepas dari dimana input tersebut dikategorikan dalam hirarki nilai wajar (yaitu Level 1, 2, atau 3; lihat paragraf 72–90). Penggunaan harga *bid* untuk posisi aset dan harga *ask* untuk posisi liabilitas diizinkan, tetapi tidak disyaratkan (PSAK 68:70).

Pernyataan ini tidak menghalangi penggunaan penentuan harga nilai tengah pasar (*mid-market pricing*) atau konvensi penentuan harga lain yang digunakan pelaku pasar sebagai panduan praktis (*practical expedient*) untuk mengukur nilai wajar dalam *bid-ask spread* (PSAK 68:71).



### 2.1.3.2.9.3 Hirarki Nilai Wajar

PSAK 68 menetapkan tiga level hirarki nilai wajar berdasarkan nilai *input* yang digunakan; (paragraf 72–90)

1. *Input* level 1 adalah harga *kuotasian* (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
2. *Input* level 2 adalah *input* selain harga *kuotasian* yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
3. *Input* Level 3 adalah *input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

### 2.1.3.3 Pengungkapan

Entitas mengungkapkan informasi untuk membantu pengguna laporan keuangannya dalam penilaian, sebagai berikut (PSAK 68:91):

- (a) untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang (*recurring*) atau tidak berulang (*non-recurring*) dalam laporan posisi keuangan setelah pengakuan awal, teknik penilaian dan *input* yang digunakan untuk mengembangkan pengukuran tersebut.
- (b) untuk pengukuran nilai wajar yang berulang yang menggunakan *input* yang tidak dapat diobservasi yang signifikan (Level 3), dampak dari pengukuran terhadap laba rugi atau penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut.

Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 91, entitas mempertimbangkan seluruh hal sebagai berikut (PSAK 68:92):

- (a) level detail yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan;
- (b) berapa banyak penekanan yang ditetapkan pada setiap persyaratan;
- (c) berapa banyak penggabungan atau pemisahan yang perlu dilaksanakan;
- (d) apakah pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan.

#### **2.1.4 Manfaat dan Kerugian dalam Penerapan Nilai Wajar**

##### **2.1.4.1 Manfaat dalam Penerapan Nilai Wajar**

Beberapa penelitian yang mendukung bahwa penerapan nilai wajar (*fair value*). Pannese dan Delfavero (2010) menyatakan bahwa penerapan nilai wajar dalam jangka panjang dapat meningkatkan transparansi secara positif pada laporan keuangan.

Maina (2010) menyatakan nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan. Nilai wajar lebih efisien dalam penyusunan penyajian laporan keuangan. Dengan mengetahui nilai wajar sebenarnya, laporan keuangan entitas dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi. Hal ini sesuai tujuan pelaporan keuangan yang terdapat dalam *Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 1*, yaitu: “*To assist the users of financial statements to make investment, lending and other economic decision*”.

#### 2.1.4.2 Kerugian dalam Penerapan Nilai Wajar

Beberapa alasan mengapa penerapan nilai wajar menjadi hal yang merugikan, Pannese dan Delfavero (2010):

- a. Auditor tidak dapat dengan mudah memverifikasi bahwa harga yang ditetapkan untuk aset atau kewajiban yang mencerminkan realitas ekonomi.
- b. Tiga tingkatan dari hirarki nilai wajar sulit untuk diuji, yaitu memerlukan estimasi berdasarkan pertimbangan dan *judgment* yang dibuat oleh pihak manajemen.
- c. Auditor dapat disalahkan karena tidak mendeteksi kesalahan nilai wajar ketika melakukan audit atas pengendalian internal bagi perusahaan di sektor keuangan di tengah krisis keuangan.
- d. Peluang bagi manajer untuk memanipulasi laba, jika auditor tidak dapat secara efektif menguji perkiraan nilai wajar.
- e. Auditor dituntut untuk menjadi "terlalu" konservatif saat mengeluarkan pendapat yang merugikan ketika pendekatan pengukuran nilai wajar tidak dapat ditentukan atau pengungkapan yang tidak cukup.
- f. Pelatihan untuk auditor saat ini tidak memadai.
- g. Pendidikan akuntansi perlu menyesuaikan akuntansi nilai wajar secara perlahan untuk menggantikan biaya historis.

Kesimpulan penelitian Pannese dan Delfavero (2010) menyatakan bahwa mungkin terlalu cepat untuk memaksa menerapkan nilai wajar pada auditor dan akuntan. Meskipun penerapan nilai wajar dapat meningkatkan transparansi secara

positif dalam jangka panjang, seharusnya memberikan waktu yang cukup untuk pelatihan menghadapi penerapan nilai wajar tersebut.

#### **2.1.5 Tantangan dalam Penerapan Nilai Wajar**

Penerapan nilai wajar (*fair value*) merupakan sebuah tantangan bagi negara yang akan melakukan penerapan dalam waktu dekat. Pannese dan Delfavero (2010) menyatakan bahwa auditor akan kesulitan memproyeksikan nilai wajar tertentu, terutama di pasar yang tidak aktif, karena harga hanya dapat dibentuk jika aset atau liabilitas dijual dan jika opsi nilai wajar dipilih atau kerangka nilai wajar disebarkan oleh *FASB* tidak ditafsirkan dengan benar, auditor eksternal dan internal akan kesulitan dalam menentukan validitas data yang ditentukan oleh manajemen perusahaan, dan akibatnya, secara signifikan akan meningkatkan risiko audit. Hal ini juga didukung oleh penelitian Omoteso dan Aziz (2014) yang menyatakan hal yang sama. Sehingga auditor akan memerlukan waktu lebih lama dalam proses audit untuk memverifikasi aset atau kewajiban dari laporan pihak manajemen perusahaan.

Menurut *PWC*, 2011 (dalam Phan *et al.* 2013) mengelola persepsi publik mengenai perubahan yang terjadi pada sistem akuntansi merupakan tantangan lain. Persepsi publik yang dimaksud adalah pihak eksternal perusahaan untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan laporan keuangan, pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemeringkat efek dan pihak-pihak yang terkait. Mengelola persepsi publik dapat dengan mensosialisasikan penerapan standar, sehingga publik dapat dengan mudah memahami penerapan standar tersebut.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang penerapan nilai wajar disajikan pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Omoteso dan Aziz (2014)	<i>The Efficacy of Fair Value Accounting: Perceptions of UK Accountants.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjukkan bahwa <i>FVA</i> bukan merupakan faktor penyumbang krisis tetapi hanya mempercepat kenyataan bahwa krisis keuangan global akan segera datang dan tidak dapat terelakkan.</li> <li>- Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan nilai wajar dianggap lebih unggul daripada biaya historis, selama nilai wajar dapat dikendalikan dengan ketat dan diterapkan dengan benar.</li> <li>- Namun, temuan lainnya menunjukkan bahwa nilai wajar telah membuat pekerjaan auditor lebih sulit, terutama di saat pasar tidak likuid, dimana verifikasi valuasi aset menjadi sangat sulit.</li> </ul>
2	Phan <i>et al.</i> (2013)	<i>Perceptions of Accounting Professionals towards International Financial Reporting Standards (IFRS) in Developing Country: Evidence from Vietnam.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat perbedaan persepsi dari auditor, akuntan perusahaan dan akademisi terhadap perbedaan keuntungan, kerugian dan tantangan dalam penerapan <i>IFRS</i> di Vietnam, namun persepsi mengenai kerugian dan biaya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.</li> </ul>
3	Kluever (2012)	<i>The Usefulness of Fair value: The Users' View Within The Context of The Conceptual Framework For Financial Reporting.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjukkan bahwa sejumlah analis melihat tingkat kedua pada hirarki nilai wajar yang digunakan kurang dapat diandalkan dibandingkan tingkat satu karena masih terbuka untuk manipulasi. Kegunaan nilai wajar tidak independen karena</li> </ul>

			<p>dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: verifikasi pihak ketiga, ketersediaan informasi lainnya, interaksi analisis dengan data, faktor entitas tertentu dan kondisi pasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis tidak percaya pada subjektivitas dari nilai wajar karena dapat dimanipulasi dan memerlukan informasi yang lebih lanjut untuk mengecek keakuratan data laporan.</li> </ul>
3	Benjamin <i>et al.</i> (2012)	<i>Fair Value Accounting and the Global Financial Crisis: The Malaysian Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mayoritas Properti di Malaysia melaporkan keuntungan nilai wajar atau mark-up dari properti investasi selama krisis 2007/2008. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak dari nilai wajar di Malaysia tidak menunjukkan karakteristik yang sama sebagai dampak dari nilai wajar di AS dan Eropa selama krisis 2007/2008.</li> </ul>
4	Pannese dan Delfavero (2010)	<i>Fair Value Accounting: Affect On The Auditing Profession</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjukkan bahwa penilaian aset atau liabilitas dalam memproyeksikan nilai wajar tertentu, bukanlah tugas yang mudah bagi auditor, terutama di pasar yang tidak aktif, karena harga hanya dapat dibentuk jika aset atau liabilitas dijual.</li> <li>- Jika opsi nilai wajar dipilih atau kerangka nilai wajar disebarkan oleh <i>FASB</i> tidak ditafsirkan dengan benar, auditor eksternal dan internal akan kesulitan dalam menentukan validitas data yang ditentukan oleh manajemen perusahaan, dan akibatnya, secara signifikan meningkatkan risiko audit.</li> </ul>
5	Laux dan Leuz (2009)	<i>The Crisis of Fair Value Accounting: Making Sense of the Recent Debate</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>FVA</i> dapat menyebabkan volatilitas dalam laporan keuangan.</li> <li>- Nilai wajar dapat menimbulkan penalaran di saat krisis, sehingga</li> </ul>

			<p>perlu ditangani - baik dalam sistem akuntansi atau peraturan kehati-hatian.</p> <p>- Mengakui bahwa aturan akuntansi dan perubahan di dalamnya dibentuk oleh proses politik (seperti peraturan lain). Peran kekuatan politik semakin merumitkan analisis.</p>
--	--	--	--

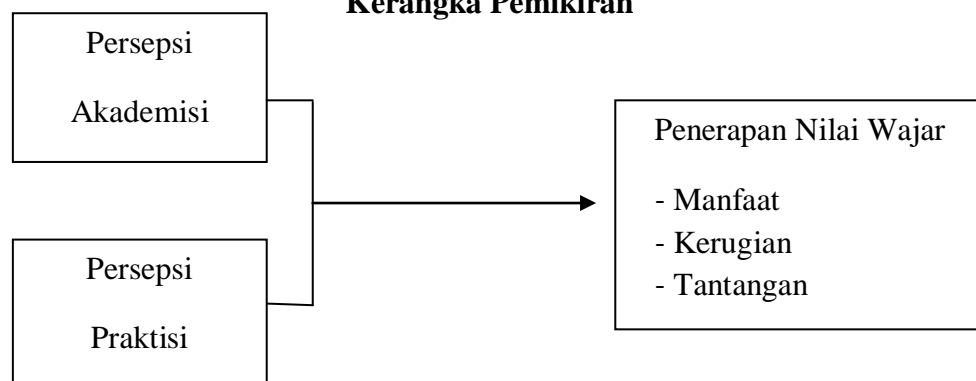
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penerapan penggunaan nilai wajar di berbagai negara menimbulkan banyak perdebatan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi akademisi dan praktisi mengenai manfaat, kerugian dan tantangan terhadap penerapan nilai wajar di Indonesia dan apakah ada perbedaan persepsi diantara keduanya, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

#### **Kerangka Pemikiran**



#### **Hipotesis:**

H<sub>1</sub> : Persepsi akademisi dan praktisi optimis terhadap penerapan nilai wajar.

H<sub>2</sub>: Persepsi akademisi dan praktisi memiliki tantangan yang besar dalam penerapan nilai wajar.

H<sub>3</sub> : Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi terhadap penerapan nilai wajar.

## **2.4 Perumusan Hipotesis**

### **2.4.1 Persepsi Akademisi dan Praktisi Terhadap Penerapan Nilai Wajar**

Teori regulasi kepentingan publik menjelaskan bahwa permintaan terhadap kebijakan atau standar merupakan tanggapan atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisien dan tidak adil (Chairiri dan Ghozali, 2003). Penelitian Phan *et al.* (2013), mengenai kebijakan atau standar penerapan *IFRS* di Vietnam juga mendukung teori tersebut. Hasil penelitian dari responden profesional akuntansi di Vietnam menyatakan bahwa penerapan *IFRS* membawa manfaat yang lebih besar dibanding kerugian dan responden mendukung kebijakan penerapan *IFRS* di Vietnam.

Penerapan nilai wajar merupakan hal yang baru bagi negara-negara yang belum menerapkannya. Untuk itu dibutuhkan kajian teori untuk mengetahui keunggulan dan kelemahannya. Mempelajari kajian teori tersebut membutuhkan literatur-literatur dari penelitian orang lain yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Hal ini akan mengakibatkan pembentukan persepsi atau *adjustment* dari akademisi maupun dari praktisi terhadap literatur yang dibacanya.

Omoteso dan Aziz (2014) menyatakan bahwa auditor akan kesulitan dalam menilai suatu aset atau liabilitas dengan menggunakan nilai wajar, terutama di saat pasar tidak likuid, dimana verifikasi valuasi aset menjadi sangat sulit. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap pembentukan opini auditor.



Berdasarkan pertimbangan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama dan kedua sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Persepsi akademisi dan praktisi optimis terhadap penerapan nilai wajar.**

Hipotesis dapat dikembangkan lagi menjadi hipotesis kedua (H<sub>2</sub>):

**H<sub>2</sub>: Persepsi akademisi dan praktisi memiliki tantangan yang besar dalam penerapan nilai wajar.**

#### **2.4.2 Perbedaan Persepsi Akademisi dan Praktisi Terhadap Nilai Wajar**

Teori beberapa kelompok yang menyatakan bahwa biaya historis dianggap tidak relevan karena biaya historis hanya mengukur pada saat terjadi transaksi tidak mengakui adanya perubahan nilai riil yang terjadi. Sehingga *IASB* telah mengeluarkan standar *IFRS* berbasis nilai wajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mencerminkan keadaan saat periode pelaporan, sehingga dapat membantu untuk pengambilan keputusan.

Maina (2010) menyatakan nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan. Nilai wajar lebih efisien dalam penyusunan penyajian laporan keuangan. Jika opsi nilai wajar dipilih atau kerangka nilai wajar disebarkan oleh *FASB* tidak ditafsirkan dengan benar, auditor eksternal dan internal akan kesulitan dalam menentukan validitas data yang ditentukan oleh manajemen perusahaan, dan akibatnya, secara signifikan akan meningkatkan risiko audit.

Penerapan nilai wajar untuk menimbulkan banyak tantangan bagi negara-negara yang akan mengadopsinya. Tantangan yang paling utama adalah

mempersiapkan sumber daya manusia, seperti akuntan perusahaan, penilai independen/ eksternal, dan pihak-pihak yang terkait. Bagi seorang akademisi dan auditor, yang bertugas mengaudit laporan keuangan dengan tidak adanya pasar aktif untuk menilai suatu aset atau kewajiban menjadi tantangan tersendiri terhadap pembentukan opini. Sebaliknya bagi kalangan akademisi, penggunaan nilai wajar menjadi tantangan dalam menentukan kajian yang lebih besar implementasinya.

Berdasarkan pertimbangan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

**H<sub>3</sub>: Terdapat perbedaaan persepsi akademisi dan praktisi terhadap penerapan nilai wajar.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Variabel Terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan nilai wajar. Penerapan nilai wajar diukur dengan indikator, yang terdiri dari 3 dimensi sebagai berikut:

##### **3.1.1.1 Manfaat**

Yaitu persepsi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari penerapan nilai wajar. Indikator dari manfaat dalam penerapan nilai wajar adalah Phan *et al.* (2013):

- a. Reliabilitas,
- b. Kepercayaan investor,
- c. Komparabilitas,
- d. Relevansi,
- e. Akses ke pasar global,
- f. Kredibilitas,
- g. Pendanaan eksternal,
- h. Kualitas audit,
- i. Hubungan dengan kreditor,
- j. Kemampuan untuk dipahami.

Agar dapat digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan skala *likert* (1-5). Skala 1 menunjukkan bahwa akademisi dan praktisi sangat tidak setuju terhadap pernyataan dari indikator tersebut. Sedangkan skala 5 menunjukkan bahwa akademisi dan praktisi setuju terhadap pernyataan dari indikator tersebut.

### **3.1.1.2 Kerugian**

Yaitu persepsi mengenai kerugian yang diperoleh dari penerapan nilai wajar. Indikator dari kerugian dalam penerapan nilai wajar adalah Phan *et al.* (2013):

- a. Terlalu kompleks untuk perusahaan kecil dan menengah,
- b. Banyak memakan waktu,
- c. Sulit dipahami,
- d. Tidak menerapkan standar global,
- e. Subjektifitas,
- f. Besar adanya intervensi politik,
- g. Kurang terperinci,
- h. Risiko kecurangan.

Agar dapat digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan skala *likert* (1-5). Skala 1 menunjukkan bahwa akademisi dan praktisi sangat tidak setuju terhadap pernyataan dari indikator tersebut. Sedangkan skala 5 menunjukkan bahwa akademisi dan praktisi setuju terhadap pernyataan dari indikator tersebut.

### 3.1.1.3 Tantangan

Yaitu persepsi mengenai tantangan yang diperoleh dari penerapan nilai wajar. Indikator dari tantangan dalam penerapan nilai wajar adalah Phan *et al.* (2013):

- a. Pelatihan staf keuangan,
- b. Memperbarui proses sistem akuntansi,
- c. Masih sedikitnya pembahasan di perguruan tinggi,
- d. Mengelola persepsi publik,
- e. Pelatihan non-staf keuangan,
- f. Memperbarui sistem IT,
- g. Sedikitnya panduan,
- h. Memperbarui proses audit.

Agar dapat digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan skala *likert* (1-5). Skala 1 menunjukkan bahwa akademisi dan praktisi sangat tidak setuju terhadap pernyataan dari indikator tersebut. Sedangkan skala 5 menunjukkan bahwa akademisi dan praktisi setuju terhadap pernyataan dari indikator tersebut.

## 3.2 Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah akademisi, yaitu seluruh dosen akuntansi di beberapa perguruan tinggi kota Semarang. Selanjutnya populasi praktisi, yaitu seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di kota Semarang.

### **3.2.2 Sampel**

Dalam penentuan sampel penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah dosen tetap program studi akuntansi di perguruan tinggi di kota Semarang. Selanjutnya kriteria auditor adalah auditor yang telah memperoleh pengalaman dan pelatihan untuk mengaudit laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku di Indonesia.

### **3.2.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang bersumber dari jawaban kuesioner dari responden yang akan dikirim secara langsung ke perguruan tinggi dan kantor akuntan publik di kota Semarang. Sumber data penelitian ini diperoleh dari responden yang telah mengisi kuesioner mengenai manfaat, kerugian dan tantangan terhadap penerapan nilai wajar di Indonesia.

### **3.2.4 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi atau membagikan secara langsung kepada responden, yaitu seluruh dosen tetap perguruan tinggi di kota Semarang dan auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di kota Semarang.

Daftar pertanyaan yang digunakan adalah pernyataan terstruktur dan berbentuk tertutup. Selanjutnya responden memberikan pendapat setiap butir pernyataan, kemudian responden mengembalikan lembar kuesioner.

Kuesioner dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berisi data demografi responden, yaitu jenis kelamin, usia, latar belakang

pendidikan, gelar profesional, posisi jabatan dan lama pengalaman kerja. Bagian kedua berisi pernyataan mengenai manfaat, kerugian dan tantangan terhadap penerapan nilai wajar di Indonesia. Selanjutnya responden memberikan pendapat setiap butir pernyataan dengan memberi tanda centang (v) atau silang (x) pada pilihan yang tepat. Pilihan yang tersedia adalah dengan menggunakan skala *likert* dari 1 sampai 5, yaitu mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

**Tabel 3.1**  
**Nilai Jawaban**

Jawaban	Nilai
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral / Ragu-ragu (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Nilai jawaban ini berlaku juga untuk butir pertanyaan yang sifatnya negatif, hanya saja jawaban responden dibalik. Jika responden menjawab pertanyaan dengan nilai 5, maka jawaban tersebut diubah menjadi nilai 1, nilai 4 menjadi nilai 2, nilai 3 tetap dan seterusnya.

### **3.3 Metode Analisis**

#### **3.3.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain: usia, lama jabatan, lama pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta gelar profesional lain yang menunjang keahlian. Analisis data ini disajikan dengan menggunakan rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Rata-rata (*mean*) merupakan penjumlahan

dari seluruh nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah data. Standar deviasi digunakan untuk mengukur seberapa luas penyimpangan nilai data dari nilai rata-rata (*mean*).

### **3.3.2 Uji Kualitas Data**

#### **3.3.2.1 Pengujian Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang telah di buat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 2011). Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila korelasi antara masing – masing indikator terhadap total skor menunjukkan hasil yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid (Ghozali, 2011).

#### **3.3.2.2 Pengujian Reliabilitas**

Reliabilitas adalah alat untuk menguji suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk dan kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan *One Shot* atau pengukuran sekali saja. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *cronbach Alpha (a)*. Menurut Ghozali, 2011 menyatakan jika nilai



koefisien alpha lebih dari 0,60 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau *reliable*.

### 3.3.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui metode grafik dan statistik. Metode statistik dalam hal ini yang digunakan adalah dengan menggunakan Uji *Kolmogorov Smirnov Test*.

- a. Jika signifikansi  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal
- b. Jika signifikansi  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.

### 3.3.2.4 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan *one sample t test* dan *Independent Sample t test*. Jika data tidak berdistribusi normal maka diuji dengan menggunakan *Mann-Whitney U test*. Pengujian *one sample t test* digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Sedangkan pengujian hipotesis *Independent Sample t-test* digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda.